

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aris Prio Agus Santoso. 2021. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres.
- Aziz Syamsudin. 2021. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- Bagir Manan. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Bryan A. Garner. 2004. *Black's Law Dictionary*.
- Chairul Anwar. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Didi Nazmi. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya.
- Ishaq. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Perihal Undang-undang*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Koentjaraningrat. 1985. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Laksanto Utomo. 2020. *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers.
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. 2000. *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau*. Yayasan Sako Batuah. Padang
- Maria Farida Indratti. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Myrna A. Safitri. 2011. *Untuk Apa Pluralisme Hukum*. Jakarta: Epistema Institute.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahmat Hamidi. 2023. *Kompilasi Peraturan Adat Nagari Balimbing. Kerapatan Adat Nagari Balimbing*.

Rianto Adi. 2016. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 1977. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: UI Pers.

..... 2004. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

..... 2011. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Umar Sulaiman. 2020. *Perilaku Menyimpang Remaja Dalam Prespektif Sosiologi*.
Goa: Alauddin University Pres.

Yuliandri. 2010. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari

C. Jurnal

Ahmad Syahir. 2023. "Kepatuhan terhadap Hukum (Sebuah Prespektif Filsafat Hukum)". *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. Vol. 1. No. 4.

Beni Kurnia Ilahi. 2023. "Materi Muatan Peraturan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Menurut sistem Pemerintahan Desa". *Jurnal Rechts Vinding*. Vol 12.

Delfina Gusman. 2023. "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Demokrasi Substantif ". *Jurnal: Unes Law Review*. Vol 5. No. 3

Desna Aromatica. 2021. "Membantu Nagari Membangun Melalui Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Di Nagari". *Jurnal: Communnity Development Journal*. Vol 2. No. 3

Ellya Rosana. 2014. "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*. Vol.10. No.1.

Fajar Nurhardianto. 2015. "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia". *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*. Vol 11. No. 1.

Fauzan Zakir. 2021. "Mengenal Sistem Pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat". *Jurnal Ensiklopedia*. Vol. 3. No. 2.

Laurensius Arliman. 2020. "Kedudukan Peraturan Nagari dalam Konstitusi Republik Indonesia" . *Lex Jurnalica*. Vol.17. No. 1.

Syamrina. 2022. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat". *Jurnal Selat*. Vol. 10. No. 1.

Sutrisno. 2016. “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah”.

Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 46. No.1

